

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian kajian kerawanan dan kerentanan banjir di Kecamatan Kota Kendal dengan metode AHP untuk menentukan bobot variabel dan *weighted overlay* pada analisis pembobotan dan skoring, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kecamatan Kota Kendal memiliki 3 tingkat kerawanan banjir yaitu, tinggi, sedang, dan rendah.
  - Tingkat kerawanan banjir tinggi seluas 22,77 ha berada disepanjang Sungai Kendal dengan jarak dari sungai <50 meter (Kelurahan Kebondalem, Pegulon, Patukangan, Pekauman, Ngilir, dan Balok).
  - Tingkat kerawanan banjir sedang seluas 1.058,12 ha merupakan daerah yang dilewati oleh Sungai Kendal (Kelurahan Trompo dan Sukodono), Sungai Buntu (Kelurahan Kalibuntu Wetan dan Langenharjo), dan Sungai Blorong (Kelurahan Banyutowo, Ketapang, dan Candirototo).
  - Tingkat kerawanan banjir rendah seluas 911,22 ha, pada sebagian wilayah di Kelurahan Sukodono, Candirototo, Karangasari, Banyutowo, Langenharjo, Ketapang, dan Bandengan.
2. Kecamatan Kota Kendal memiliki 2 tingkat kerentanan banjir yaitu, sedang dan rendah diantaranya,
  - Tingkat kerentanan banjir sedang pada 12 kelurahan diantaranya, Kelurahan Bandengan, Karangasari, Ngilir, Balok, Kebondalem, Trompo, Patukangan, Ketapang, Banyutowo, Ketapang, Candirototo, Langenharjo, dan Pegulon.
  - Tingkat kerentanan banjir rendah pada 3 kelurahan diantaranya, Kelurahan Kalibuntu Wetan, Sukodono, dan Pekauman.
  - Indeks kerentanan kumulatif (IKK) tertinggi terletak pada Kelurahan Karangasari sebesar 2,18 dan terendah terletak pada Kelurahan Pekauman sebesar 1,48.
  - Indeks kerentanan fisik (IKF) tertinggi terletak pada Kelurahan Kebondalem dan Patukangan sebesar 2,35. Indeks kerentanan sosial (IKS) tertinggi juga terletak pada Kelurahan Kebondalem sebesar 2,19. Indeks kerentanan ekonomi (IKE) tertinggi terletak pada Kelurahan Karangasari, Banyutowo, Ketapang, Candirototo, dan Bandengan sebesar 2,85.

## 5.2 Rekomendasi

Dari hasil kajian kerawanan dan kerentanan banjir di Kecamatan Kota Kendal, maka terdapat beberapa rekomendasi-rekomendasi untuk pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Pemerintah
  - BPBD Kabupaten Kendal diharapkan dapat melakukan pembaharuan data mengenai persebaran daerah rawan banjir.
  - BPBD Kabupaten Kendal dapat berkoordinasi dengan Baperlibang Kabupaten Kendal untuk mendetailkan data frekuensi kejadian banjir dan kedalaman genangan dengan data persebaran daerah rawan banjir.
  - BPBD dan Baperlitbang Kabupaten Kendal dapat berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Kendal dalam pembuatan peta kerawanan banjir dengan mengkaitkan peta daerah rawan banjir yang sudah dibuat dengan data kondisi geometri sungai yang ada.
  - Pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai tanggap bencana dan peringatan dini kepada penduduk yang berada pada daerah tingkat kerawanan banjir tinggi dan sedang.
2. Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
  - Perencanaan wilayah dan kota disini berperan sebagai *planning, organizing, actuating,* dan *controlling* dalam manajemen bencana melalui regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam untuk itu diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana ini dapat berupa struktural maupun non struktural.
3. Masyarakat Umum
  - Masyarakat yang berada pada daerah rawan banjir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD Kabupaten Kendal melalui organisasi kemasyarakatan yang sudah ada sebelumnya untuk mempermudah penyampaian peringatan dini bencana banjir serta meminimalisir dampak korban jiwa dari banjir tersebut.
4. Untuk Penelitian Selanjutnya
  - Berkaitan dengan variabel kerawanan banjir yaitu daerah rawan banjir dan jarak sungai karena memiliki tingkat bias yang tinggi maka kedua variabel tersebut dapat diganti dengan variabel lama genangan banjir melalui *overlay* aritmatik dan dapat ditambahkan hasil dari wawancara pada beberapa penduduk untuk meningkatkan tingkat validasi model kerawanan banjir.